

# Dari Government Contractor *Think Tank* Ke *Think Tank* Hibrida: Adaptasi Dan Reposisi Peran Csis Indonesia Di Era Reformasi (1998-2025)

Revo Linggar Vandito<sup>1\*</sup>, Abdul Ghofur<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Prodi Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta

Corresponding Author's e-mail : [revovando@gmail.com](mailto:revovando@gmail.com)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 193-207

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2368>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2368>

## Article History:

Received: 20-05-2026

Revised: 08-06-2026

Accepted: 18-06-2026

**Abstract :** *CSIS Indonesia is one of the most influential think tanks in Southeast Asia; however, the transformation of its role from the New Order to the Reform Era has not been thoroughly examined in Indonesian political science literature. This study aims to analyze the typological transformation of CSIS Indonesia using Abelson's (2012) think tank typology framework and Medvetz's (2012) theory of think tank positioning. The research employs a qualitative method with a case study design and interpretivist approach, through structured interviews with researchers and academics as well as documentary analysis of primary and secondary sources. The findings indicate that during the 1971–1987 period, CSIS Indonesia functioned as a Government Contractor Think Tank dependent on state patronage through the networks of Ali Moertopo and Soedjono Hoemardhani. Following the rupture of its relationship with the Soeharto regime, CSIS pursued three adaptive strategies: establishing international think tank networks, opening itself to foreign donors, and consolidating media and business infrastructure. In the Reform Era, CSIS Indonesia cannot be classified into a single typology; rather, it simultaneously exhibits characteristics of an advocacy think tank, a university without students, and a policy club, making it more accurately described as a typologically anomalous hybrid think tank. This finding confirms Abelson's proposition that typological identification of think tanks is an inherent challenge, while also demonstrating that typologies developed in a North American context require conceptual adaptation when applied to think tanks operating in countries with authoritarian legacies.*

**Keywords :** *CSIS Indonesia, Think Tank, Think Tank Typology, Reform Era*

**Abstrak :** CSIS Indonesia merupakan salah satu think tank paling berpengaruh di Asia Tenggara, namun transformasi perannya dari era Orde Baru hingga era Reformasi belum dikaji secara mendalam dalam literatur ilmu politik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi tipologis CSIS Indonesia dengan menggunakan kerangka tipologi Abelson (2012) dan teori pemosisian think tank Medvetz (2012). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus dan pendekatan interpretivisme, melalui wawancara terstruktur dengan peneliti dan akademisi serta studi kepustakaan terhadap dokumen primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 1971–1987 CSIS Indonesia berfungsi sebagai Government Contractor Think Tank yang bergantung pada patronase negara melalui jaringan Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardhani. Pasca retaknya relasi dengan rezim Soeharto, CSIS melakukan tiga strategi adaptasi: membangun jejaring think tank internasional, membuka diri terhadap donor asing, dan mengonsolidasikan infrastruktur media dan bisnis. Pada era Reformasi, CSIS Indonesia tidak dapat diklasifikasikan ke dalam satu tipologi tunggal, melainkan berada di antara advocacy think tank, university without students, dan policy clubs secara simultan, sehingga lebih tepat disebut sebagai think tank hibrida yang anomali secara tipologis. Temuan

ini mengonfirmasi proposisi Abelson bahwa identifikasi tipologis think tank merupakan tantangan inheren, sekaligus menunjukkan bahwa tipologi yang dikembangkan dalam konteks Amerika Utara memerlukan adaptasi konseptual ketika diterapkan pada think tank di negara dengan warisan otoritarianisme.

**Kata Kunci** : CSIS Indonesia, Think Tank, Tipologi Think Tank, Reformasi

## PENDAHULUAN

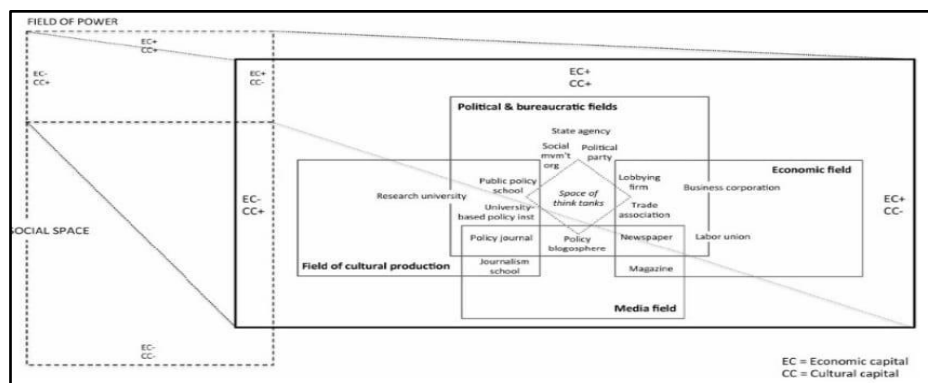
Dalam negara demokrasi, masyarakat sipil memiliki peran fundamental sebagai *watchdog* dan *counterbalance* terhadap kekuasaan negara, sekaligus memastikan koneksi antara aspirasi warga dengan proses pembuatan kebijakan (Diamond, 1999). Salah satu aktor masyarakat sipil yang menempati posisi strategis dan memahami logika negara maupun logika masyarakat sipil adalah *Think Tank*. Sebagai lembaga riset kebijakan, *Think Tank* berfungsi sebagai *knowledge producer* yang menghubungkan dunia akademis dengan arena kebijakan publik (Stone, 2007). Melalui riset independen, analisis berbasis data, serta advokasi kebijakan, *Think Tank* mampu memperkuat kualitas demokrasi dengan menghadirkan wacana alternatif, mengawasi praktik pemerintahan, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif (McGann, 2020). Dengan demikian, *Think Tank* tidak sekadar lembaga teknokratis, melainkan aktor masyarakat sipil yang berperan menjaga ruang deliberatif dan berpotensi memperlambat regresi demokrasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa *Think Tank* memiliki peran penting dan fundamental dalam menjaga kebebasan sipil dan kualitas demokrasi pada suatu negara

*Think Tank* merupakan salah satu aktor kunci dalam ekosistem demokrasi modern, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, *Think Tank* berperan menghasilkan pengetahuan berbasis riset, memberikan rekomendasi kebijakan, sekaligus menjembatani komunikasi antara negara dan masyarakat (Stone, 2007; Rich, 2004). Dalam konteks demokrasi, *Think Tank* tidak hanya berfungsi sebagai pusat analisis kebijakan (*policy analysis center*), melainkan juga sebagai arena advokasi ide dan nilai, termasuk dalam mempertahankan ruang kebebasan sipil. Keberadaan *Think Tank* menjadi signifikan karena mereka mampu mengartikulasikan isu-isu yang kerap terabaikan dalam arus utama politik, serta menghadirkan legitimasi akademik yang dapat memengaruhi pengambil kebijakan maupun membentuk opini publik.

Selain itu ditemukan beberapa studi yang terfokus pada analisis terhadap pentingnya organisasi atau lembaga *Think Tank* dalam sebuah negara untuk menjaga kualitas demokrasi khususnya pada negara negara yang sedang berupaya meraih konsolidasi demokrasi. Salah satu penelitian yang dilakukan di Ghana yang menyebutkan bahwa kehadiran lembaga *Think Tank* di Ghana seperti Institute of Economic of Affairs (IEA), the Centre for Democratic Development (CDD) and the Institute for Democratic Governance (IDEG) telah memperkuat kualitas demokrasi di Ghana dengan menjadi pengawas eksternal dalam pemilu, hingga memperluas inklusivitas negara dengan mendorong pengesahan undang undang disabilitas, selain itu organisasi *Think Tank* di Ghana telah berhasil mendorong pengesahan undang undang kebebasan informasi (Botchway, 2018). Selain Ghana, fenomena serupa ditemukan di Mexico sebagaimana yang disampaikan (Sallas-Porras, 2021) yang menyebutkan bahwa beberapa think tank seperti CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas), Mexican Institute for Competitiveness (IMCO), FUNDAR telah berhasil melakukan beberapa upaya yang berhasil membuka ruang ruang sipil dengan beberapa langkah-langkah advokasi kebijakan seperti forum Observatorium Warga, aktivisme sosial terhadap suatu kebijakan

Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa posisi *Think Tank* dalam demokrasi berada pada level penghubung dan jembatan antara logika negara (pemerintah) dengan logika masyarakat sipil.

Hal ini disebabkan karena karakteristik *Think Tank* yang berbeda dengan organisasi sipil lainnya. Organisasi *Think Tank* secara umum memiliki karakteristik posisi yang cukup istimewa dibandingkan kelompok masyarakat sipil lainnya, baik dari segi kekayaan (rata-rata anggaran dan staf yang lebih besar), pengaruh politik, pengetahuan (tingkat pendidikan staf), maupun jaringan sosial. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa *Think Tank* sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil yang memiliki modal sosial yang kuat, sehingga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas demokrasi pada suatu negara (Jezierska, 2020)



**Gambar 2.1** Posisi *Think Tank* Dalam Hubungan Negara dan Masyarakat Sipil (Medvetz, 2012)

Namun peran *Think Tank* juga sangat bergantung dengan kondisi atau iklim demokrasi suatu negara. Sebagai contoh terdapat perbedaan yang amat besar antara *Think Tank* yang berada di Amerika Serikat dengan *Think Tank* yang berada di negara yang sedang melakoni proses demokratisasi. Dalam konteks Amerika Serikat (Medvetz, 2012) menyebutkan bahwa dalam konteks Amerika Serikat *Think Tank* hadir sebagai pendamping pemerintah, hal itu disebabkan karena adanya koneksi yang terbangun secara historis antara senator dengan think tank. Beberapa *Think Tank* di Amerika Serikat pasca pemilu senator melakukan hubungan erat dengan beberapa *Think Tank* sebagai penasihat dari senator dalam beberapa kebijakan. Disisi lain dalam konteks Asia disebutkan dalam (Stone, 2004) bahwa pada awal tahun 90 an kultur think tank berada dalam posisi yang dekat dengan pemerintah, namun pada dekade 2000 an beberapa think tank bertransformasi menjadi lembaga yang lebih netral dan cenderung berada dalam posisi public watchdog yang berada di luar pemerintahan dan tidak menjadi penasihat pemerintah secara intelektual (Hajer, 1993; Pautz, 2011)

Secara umum, (Weaver & McGann, 2017) mengkategorikan *Think Tank* kedalam 4 kategori *Think Tank*. Seperti *Think Tank* akademik, Think Tank Kontraktur Pemerintah, Think Tank Advokasi dan Think Tank kepartaian. Secara general Think Tank akademik merupakan sebuah Think Tank yang merekrut staf dengan kredensial akademik kuat seperti gelar Ph.D. dari universitas bergengsi, dengan agenda yang ditetapkan secara internal melalui proses bottom-up oleh para peneliti sendiri, serta menghasilkan output berupa monograf akademik dan artikel jurnal yang didanai oleh kombinasi yayasan, korporasi, dan individu. Berbeda dengan itu, Think Tank kontraktur pemerintah umumnya didanai melalui kontrak dengan lembaga pemerintah yang memegang kendali besar atas penetapan agenda penelitian, sehingga outputnya lebih berupa laporan kepada klien ketimbang publikasi ilmiah yang beredar luas. Sementara itu, Think Tank advokasi, meskipun secara formal bersifat independen, terikat pada kelompok ideologis atau kepentingan tertentu dan memandang perannya sebagai pemenang "perang ide" ketimbang pencarian kebijakan terbaik secara objektif, dengan produk penelitian yang cenderung berupa

dokumen advokasi singkat. Adapun Think Tank kepartaian diorganisasikan di sekitar isu dan platform partai politik tertentu, dengan agenda yang sangat dipengaruhi oleh kebutuhan partai tersebut, dan paling umum ditemukan di Eropa Barat, khususnya di Jerman dengan contoh seperti Konrad Adenauer Stiftung dan Friedrich Ebert Stiftung (Weaver & McGann, 2017).

Dalam tipologi yang lain (Abelson, 2012) menjelaskan setidaknya terdapat 5 jenis tipologi Think Tank yang merupakan hasil pengembangan dari temuan (Weaver & McGann, 2017). Tipologi pertama adalah *universities without students* atau lembaga riset mandiri yang memproduksi kajian akademis mendalam seperti Brookings Institution dan Hoover Institution, meskipun Abelson mencatat bahwa di Kanada kategori ini lebih tepat disebut sebagai *policy research institutions* mengingat tidak ada lembaga yang benar-benar menyerupai skala institusi riset besar di Amerika Serikat. Tipologi kedua adalah *government contractors*, yakni think tank yang sumber pendanaannya berasal terutama dari pemerintah, seperti RAND dan Urban Institute di Amerika Serikat, serta sejumlah "government councils" yang sempat dibentuk pemerintah federal Kanada pada 1960-an dan kemudian banyak dibubarkan pada awal 1990-an akibat pemotongan anggaran. Ketiga adalah *advocacy think tanks* yang mulai marak sejak awal 1970-an, ditandai oleh orientasi ideologis yang kuat dan strategi komunikasi agresif untuk mempengaruhi opini publik dan kebijakan melalui media massa maupun media sosial. Keempat adalah *legacy-based* atau *vanity think tanks*, yaitu lembaga yang didirikan oleh mantan pemimpin politik untuk meneruskan agenda ideologis mereka pasca-jabatan, seperti Manning Centre dan Broadbent Institute di Kanada. Kelima adalah *policy clubs*, sebuah kategori yang dikemukakan oleh Lindquist untuk menggambarkan banyak think tank Kanada yang lebih berfungsi sebagai forum diskusi antara akademisi, analis, dan pembuat kebijakan ketimbang sebagai produsen analisis strategis jangka panjang; dan di luar kelima kategori tersebut, Abelson menambahkan satu tipologi tambahan yakni *think-and-do tanks*, organisasi yang tidak hanya merumuskan rekomendasi kebijakan tetapi juga menerjemahkannya secara langsung ke dalam tindakan konkret di lapangan.

Menariknya dalam segi pemosisian (Medvetz, 2012) secara teoritis merupakan suatu kelompok masyarakat sipil yang sangat sulit untuk independen dari berbagai aspek seperti bisnis, politik, kultur hingga kepentingan media. Sehingga (Medvetz, 2012) menyebutkan bahwa think tank merupakan ruang kosong yang mengisi antara logika negara, masyarakat, media, hingga bisnis, sehingga think tank memiliki beban untuk menciptakan pembahasan akademik dari berbagai kepentingan tersebut

Dalam konteks Asia Tenggara literatur terkait dengan *Think Tank* cenderung minim dan sulit untuk ditemukan. Namun Diane Stone dengan menggunakan pendekatan historis melakukan analisis terkait dengan awal mula kemunculan *Think Tank* di Asia Tenggara. Menurutnya iklim *Think Tank* di Asia Tenggara jauh berbeda dengan *Think Tank* yang ada di Amerika Serikat, Kanada, bahkan Eropa. Hal ini disebabkan karena lingkungan epistemik yang belum terbentuk secara koheren hingga awal mula kemunculan *Think Tank* yang cenderung serupa dengan *Government-Organized Non-Governmental Organization* (GONGO) sehingga *Think Tank* cenderung memiliki fungsi sebagai alat untuk melegitimasi kebijakan pemerintah. Relasi antara *Think Tank* dan negara pada awal kehadiran *Think Tank* di Asia Tenggara bersifat patronase hingga terhubung melalui elit politik (Stone, 2017). Hal ini berimplikasi pada sulitnya mengklasifikasikan *Think Tank* kedalam tipologi *Think Tank* khususnya yang dituliskan oleh Abelson yang terdiri dari Akademik, Kontrak, Advokasi dan Afiliasi Partai. Sehingga dapat dikonklusikan bahwa gaya *Think Tank* yang paling dominan adalah quasi-governmental, yaitu organisasi non-pemerintah yang pada dasarnya dikendalikan atau sangat dipengaruhi oleh pemerintah (GONGO). Bahkan lembaga-lembaga yang didirikan secara privat pun tetap memiliki

hubungan yang erat dengan, atau sangat mempertimbangkan kepentingan, elite politik dan para pemegang kekuasaan (Stone, 2000)

Dalam konteks Indonesia salah satu representasi *Think Tank* yang memiliki modal sosial yang besar, popularitas, hingga kekuatan politik dan relasi yang baik dengan pemerintah adalah CSIS Indonesia. CSIS Indonesia memiliki kredibilitas dan popularitas yang dibuktikan dengan peringkat CSIS Indonesia yang berada pada peringkat kedua *Think Tank* terbaik se-Asia Pasifik dan berada pada peringkat ke 86 dunia berdasarkan Global *Think Tank* Index 2020. Dengan reputasi internasional, beberapa pengurus CSIS Indonesia memiliki pengalaman sebagai pejabat publik CSIS Indonesia memiliki modal yang besar untuk menjaga kebebasan sipil dan memberikan kontrol terhadap pemerintah melalui narasi serta hasil hasil riset yang dibuat secara mendalam. Selain itu dengan pengurus yang menjadi bagian dari pemerintah, tentu akan menjadi pertanyaan, apakah CSIS Indonesia akan menjadi *Think Tank* yang melegitimasi dalih pemerintah di tengah regresi kebebasan sipil yang ada atau justru dapat menjadi aktor penting yang berupaya menjaga kualitas dan hak kebebasan sipil di Indonesia

CSIS Indonesia (Centre for Strategic and International Studies) didirikan pada tahun 1971 oleh sekelompok intelektual muda seperti Harry Tjan Silalahi, Jusuf Wanandi, Sofjan Wanandi, Hadi Soesastro, Clara Joewono, dan Daoed Joesoef dengan dukungan Jenderal Ali Moertopo serta Jenderal Soedjono Hoemardani. CSIS Indonesia Lahir di tengah konsolidasi Orde Baru, CSIS menjadi *Think Tank* independen pertama di Indonesia yang cepat dikenal di dalam negeri maupun komunitas internasional. Tujuan utama pendiriannya adalah memberikan masukan kebijakan yang rasional dan berbasis bukti kepada pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat, sektor swasta, serta publik luas, tanpa harus terikat pada birokrasi negara. Sejak awal, CSIS mengusung misi *nation and character building* yang berakar pada nilai Pancasila, dengan penekanan pada toleransi, persatuan dalam keberagaman, dan keadilan sosial. Selain itu, CSIS juga mendorong modernisasi dan keterbukaan ekonomi, membangun jejaring internasional dengan *Think Tank* global, serta menempatkan regionalisme, khususnya ASEAN, sebagai prioritas utama. Dengan visi tersebut, CSIS berperan tidak hanya sebagai mitra intelektual pemerintah Orde Baru, tetapi juga sebagai pusat gagasan yang menjaga independensi serta bertransformasi mengikuti dinamika politik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari perbedaan relasi antara CSIS pada periode orde baru dengan era reformasi. Sebab ditunjukkannya beberapa peneliti dan pengurus CSIS dalam pemerintahan, baik pada masa pemerintahan orde baru dan reformasi tidak bisa menjadi parameter tersendiri dalam melihat sikap atau peran CSIS dalam masa pemerintahan orde baru dengan masa era reformasi yang berlangsung hingga kini. Sebab (Abelson, 2018) menjelaskan bahwa dalam melihat peran *Think Tank* dibutuhkan sebuah analisis yang mendalam terutama apabila terdapat perbedaan latar belakang politik. Meskipun tentu banyak perbedaan iklim politik pada era orde baru dengan masa era reformasi. Perbedaan dan persamaan tersebut yang mendasari peneliti untuk melihat secara mendalam transformasi peran *Think Tank* khususnya CSIS Indonesia pada 2 masa tersebut, yakni pada era orde baru dan reformasi.

Apabila terdapat kedekatan dengan pemerintahan orde baru, kini CSIS tidak memiliki privilege sebagaimana yang terjadi pada era orde baru. Dengan perbedaan peran think thank sebagaimana yang dijelaskan beberapa akademisi, bahwa beberapa *Think Tank* memiliki fungsi sebagai penasihat kebijakan publik pemerintah yang berada di dalam pemerintahan. Namun beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa *Think Tank* berada sebagai titik temu antara negara, masyarakat hingga bisnis dan media. Namun beberapa penelitian juga menyebutkan bagaimana *Think Tank* sebagai kelompok masyarakat sipil berada pada posisi yang berposisi dengan

pemerintah atau menjadi public watchdog terhadap kebijakan pemerintah berdasarkan research based outcome. Untuk itu penelitian ini akan menyumbangkan penelitian terbaru dalam melihat tren hubungan antara *Think Tank* dengan pemerintah. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran think tank dalam berbagai konteks politik dan geografis, mulai dari Swedia (Allern & Pollack), Malaysia (Adams *et al.*, 2021), Ghana (Ohemeng, 2015), Tiongkok (Zhang, 2021; Köllner *et al.*, 2018), Norwegia (Christensen & Holst), Jerman, Denmark, dan Inggris (Kelstrup, 2021), Taiwan (Chen & Xu), hingga Amerika Serikat (Drezner, 2020). Meski beragam dalam konteks, mayoritas penelitian tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa posisi dan peran think tank sangat ditentukan oleh iklim demokrasi, orientasi ideologis, serta relasi antara think tank dengan negara dan media di masing-masing negara yang diteliti.

Namun dalam konteks Indonesia, sangat sedikit penelitian yang membahas peran think tank dalam sistem politik di Indonesia. Salah satu penelitian yang membahas perang think tank dalam suatu pemerintahan adalah penelitian (Muhyiddin, 2019) yang menjelaskan peran Bappenas dalam tata kelola pemerintahan. Namun karena Bappenas merupakan bagian dari Kementerian maka hal ini berbeda dengan definisi (Medvetz, 2012) bahwa sejatinya think tank merupakan bagian dari kelompok masyarakat sipil. Hal ini menyebabkan adanya gap yang besar dan kebaruan terkait peran think tank dalam perpolitikan di Indonesia. Untuk itu peneliti memilih untuk melihat perkembangan atau melihat transformasi think tank khususnya CSIS Indonesia sebagai Think Tank terbaik di Indonesia, Think tank terbaik kedua di Asia Pasifik, dan Think Tank terbaik ke 86 di dunia dari masa orde baru dan dalam menghadapi era baru yang disebut reformasi. Hal ini penting karena adanya perbedaan tingkat kedekatan antara CSIS Indonesia pada zaman orde baru dengan pada masa reformasi. Penelitian ini akan menjadi “Benchmark” terkait peran think tank dalam era reformasi sekaligus mengkonfirmasi atau mengkonfrontasi teori terkait hubungan think tank dengan pemerintah yang menyebutkan bahwa sejatinya peran think tank sangat bergantung pada rezim dan iklim demokrasi yang ada pada suatu negara

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian berbasis studi kasus. Selain itu pendekatan yang digunakan untuk mengoperasionalisasi penelitian merupakan pendekatan interpretivisme yang memungkinkan penelitian mendalami makna dan pengalaman narasumber untuk melihat pola pola yang terjadi. Sebagaimana yang dituliskan (Rhodes & Bevir, 2015) menyebutkan bahwa pendekatan interpretivis berupaya

Dalam proses pengumpulan data, penelitian menggunakan metode pengumpulan data wawancara terstruktur dan studi kepustakaan sebagai pelengkap data sehingga penelitian ini menggunakan 2 data utama yakni data primer yang dilakukan dengan wawancara terhadap informan yang ditentukan sebelumnya dan data sekunder yang terdiri dari dokumen, memoar Jusuf Wanandi, Harry Tjan Sillalahi hingga monograf 50 tahun CSIS Indonesia yang dituliskan Peter McAwley. penelitian akan dilanjutkan dengan menggunakan analisis narasi yang menurut Bryman (2016) sebagai teknik yang kerap digunakan dalam studi yang dilakukan melalui wawancara atau studi kasus. Bryman (2016) menekankan analisis narasi sebagai analisis data kualitatif yang menekankan pada cerita-cerita yang digunakan orang untuk menjelaskan suatu peristiwa. Lebih lanjut, narasi tersebut kemudian ditafsirkan oleh penulis dalam makna yang lebih luas dan menempatkannya pada konteks yang relevan. Dalam menafsirkan transkrip wawancara peneliti akan menggunakan bantuan software NVIVO untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis tematik dengan kode kode yang ditentukan dan dalam implementasinya diharapkan dapat menemukan kode kode baru yang dapat dianalisis secara mendalam. Terakhir, penulis memaparkan hasil studi melalui argumentasi yang menyoroti pada proses, teori, serta ciri

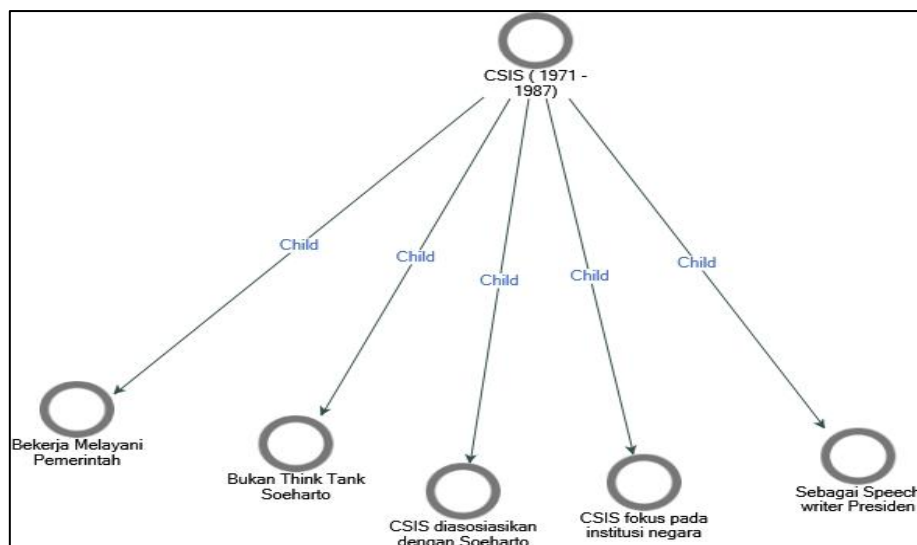
khas dan umum dari apa yang ditemukan dalam pernyataan subjek penelitian maupun pada yang ditemui dari data sekunder

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang diungkapkan (Abelson, 2012) sejatinya cukup sulit untuk dapat memberikan cap atau mengidentifikasi Think Tank dengan tipologi tertentu. Hal ini disebabkan karena sifat think tank yang “fluid” dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun beberapa akademisi telah menuliskan tipologi think tank secara beragam, namun merupakan hal yang sulit untuk mengidentifikasi tipologi think tank. Untuk itu pembahasan ini akan berupaya untuk melihat bagaimana pergeseran CSIS Indonesia melalui 3 era penting, yakni era CSIS sebagai Government Contractor Think Tank pada tahun (1971-1987) pada masa transisi atau yang saya sebut sebagai era membangun modalitas politik dan koneksi politik (1987-1998) dan terakhir pada era kontemporer (2000-2026), pada bagian ini peneliti akan berupaya mengidentifikasi tipologi CSIS sebagai Think Tank dengan melihat berbagai perubahan yang terlihat jelas pada era orde baru, transisi hingga era kontemporer.

### CSIS Sebagai Government Contractor Think Tank (1971-1987)

Sejak awal mula kelahiran CSIS Indonesia pada tahun 1971, CSIS Indonesia sudah diasosiasikan dengan pemerintahan orde baru. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni kedekatan CSIS Indonesia dengan beberapa tangan kanan Presiden Soeharto yakni Ali Moertopo, Soedjono Hoemardhani hingga terakhir oleh L.B Moerdani.



Visualisasi Hasil Penelitian CSIS Indonesia (1971-1987) Sumber: {Dokumen Pribadi}

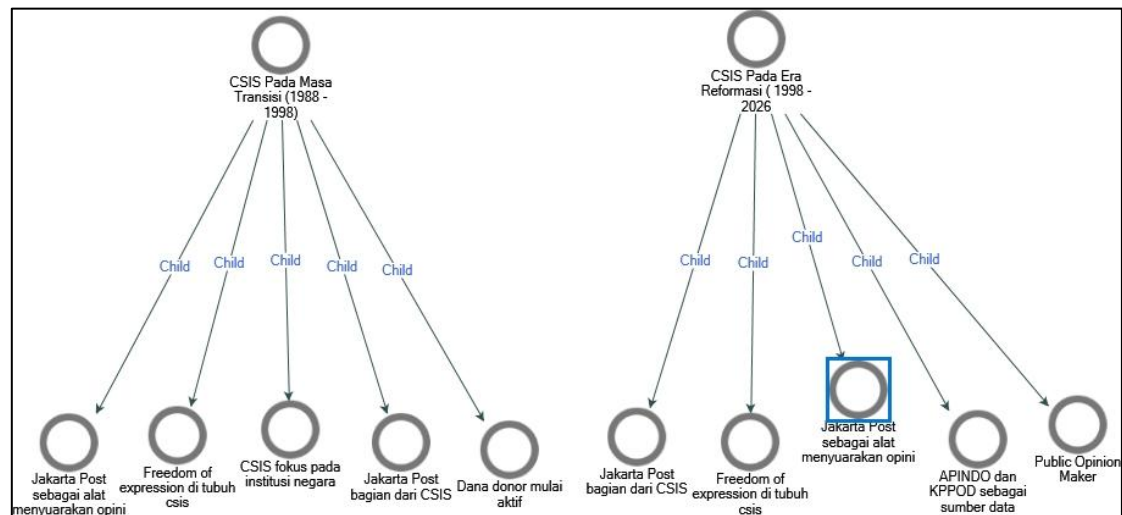
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, setidaknya dapat dikonklusikan bahwa CSIS Indonesia pada periode 1971-1987 merupakan sebuah Think Tank yang memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah, meskipun begitu secara status CSIS merupakan lembaga think tank yang tidak terikat secara institusional dengan pemerintahan. Dalam kode kode yang ditemukan pasca melakukan pengolahan data primer dapat dijelaskan bahwa mayoritas pekerjaan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang dilakukan untuk membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan tertentu, selain itu beberapa kode juga menyebutkan bahwa walaupun secara resmi CSIS Indonesia bukan merupakan Think Tank dibawah Presiden Soeharto namun CSIS diasosiasikan dengan pemerintahan Soeharto karena mekanisme kerja CSIS Indonesia pada saat itu

adalah berkenaan dengan memberikan saran kebijakan kepada pemerintah hingga menjadi penulis pidato Presiden Soeharto (Wawancara dengan Direktur Riset CSIS Indonesia, 2026). Sehingga relasi antara CSIS Indonesia dengan pemerintah dilandasi dengan koneksi yang dimiliki CSIS Indonesia dengan aktor politik yang merupakan tangan kanan Presiden Soeharto. Hal tersebut diimplementasikan dalam berbagai kebijakan, khususnya dalam konteks kebijakan luar negeri, sebagai contoh dalam konteks normalisasi hubungan dengan Jepang dengan peran besar dari Soedjono Hoemardani. Selain itu monograf yang dituliskan Peter McAuley turut menuliskan bahwa beberapa punggawa CSIS Indonesia seperti J Panglaykim seringkali menuliskan ide ide kerjasama bisnis dan kerjasama multilateral dengan Jepang untuk meningkatkan ekonomi. Selain itu beberapa peneliti CSIS Indonesia seperti Djisman Simandjuntak selalu konsisten menyuarakan model ekonomi pro pasar kepada pemerintahan Soeharto.

Apa yang terjadi pada CSIS Indonesia pada era 1971-1987 merupakan ciri khas dari model Think Tank di Asia Tenggara sebagaimana yang dituliskan (Stone, 2017) bahwa Think Tank di Asia Tenggara merupakan Think Tank dengan tipe GONGO (Government Organization Non Government Organization) sebuah organisasi yang didefinisikan dibentuk atau memiliki relasi patron klien atau mayoritas pendanaan dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini relasi tersebut terlihat dengan kehadiran Ali Moertopo sebagai penghubung dan sosok yang memberikan CSIS tempat untuk berkantor di Jalan Kesehatan Jakarta Pusat. Apabila menggunakan tipologi (Weaver & Mcgann, 2017) bahwa Government Contractor Think Tank adalah think tank yang diciptakan untuk memberikan saran khusus pada pemerintah terkait suatu kebijakan, hal itu sudah sesuai dengan mekanisme kerja CSIS Indonesia dalam kurun waktu 1971-1987. Selain itu pada era tersebut CSIS Indonesia belum secara aktif mencari pendanaan asing atau donor asing yang merupakan sumber pendanaan utama Think Tank hingga NGO di Indonesia. Sehingga hal ini mendukung proposisi yang menyebutkan bahwa selama tahun 1971 dan 1987 CSIS merupakan Government Contractor Think Tank yang memiliki relasi dengan aktor politik yang ada di dalam pemerintahan Soeharto.

### **Rekonstruksi Modal: Strategi Adaptasi CSIS Indonesia Pasca era Government Think Tanks**

Relasi antara CSIS Indonesia dan Pemerintahan Soeharto mulai memudar pasca wafatnya 2 konektor utama CSIS dengan pemerintahan Soeharto yakni Ali Moertopo yang wafat pada Mei 1984 dan diikuti wafatnya Soedjono Hoemardhani yang wafat pada tahun 1986. Hilangnya koneksi terhadap Presiden Soeharto diperburuk dengan saran yang diberikan Jusuf Wanandi kepada Presiden Soeharto untuk memiliki persiapan untuk memikirkan suksesor kepemimpinannya. Hal itu tidak direspon dengan baik oleh Presiden Soeharto, sehingga Presiden Soeharto turut memberikan ultimatum kepada para menteri untuk tidak berhubungan lagi dengan CSIS Indonesia (McAuley, 2021). Sehingga pasca tahun 1987 relasi CSIS Indonesia dengan pemerintahan Soeharto sudah retak. Dalam merespon hal tersebut, setidaknya terdapat 3 strategi yang dilakukan CSIS Indonesia untuk beradaptasi di dalam situasi tersebut, namun dari ketiga strategi tersebut ketiganya merupakan upaya upaya untuk membangun modalitas politik dan koneksi politik yang bertujuan untuk menjaga eksistensi CSIS Indonesia sebagai Think Tank.



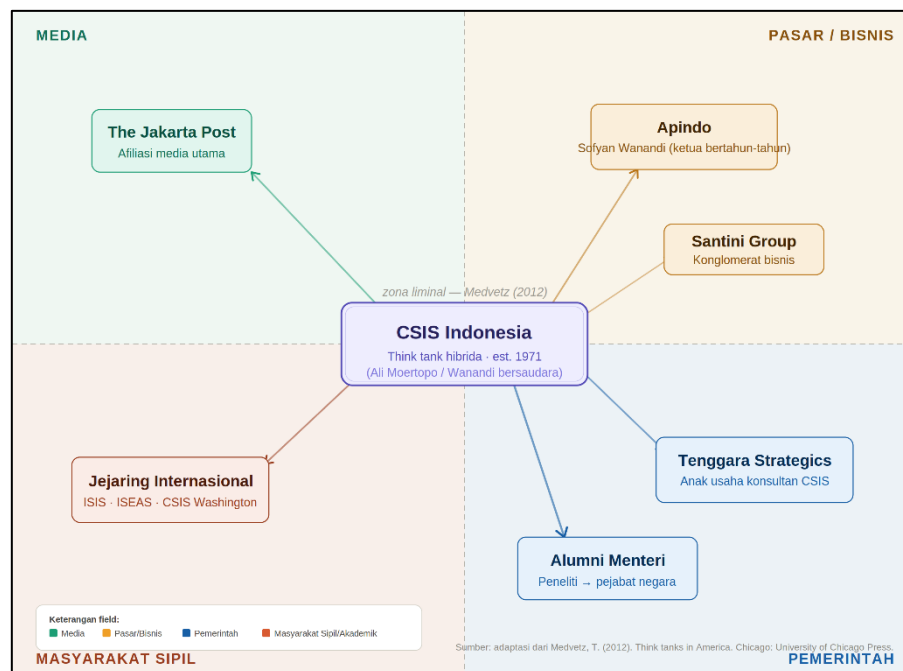
Visualisasi Hasil Penelitian CSIS Indonesia era (1987-2026) Sumber: {Dokumen Pribadi}

**Strategi pertama** yang dilakukan adalah membuka koneksi dengan komunitas epistemik atau Think Tank di kancan internasional. Hal ini merupakan respon pertama yang dilakukan CSIS Indonesia pasca mengetahui hubungannya telah memburuk dengan pemerintahan Soeharto. Dalam mengimplementasikan ide tersebut terdapat beberapa destinasi negara yang dikunjungi CSIS Indonesia, salah satunya adalah Amerika Serikat. Hal ini merupakan respon pertama yang dilakukan CSIS Indonesia pasca mengetahui hubungannya telah memburuk dengan pemerintahan Soeharto. Dalam mengimplementasikan ide tersebut terdapat beberapa destinasi negara yang dikunjungi CSIS Indonesia, salah satunya adalah Amerika Serikat. Dalam perjalanannya Jusuf Wanandi turut melakukan kunjungan pada Think Tank terkemuka di Indonesia seperti Heritage Foundation, RAND, hingga Ford Foundation, selain itu dengan koneksi yang sudah dimiliki sebelumnya pasca melakukan normalisasi dengan Jepang sehingga turut melakukan kerjasama dengan Japan Institute of International Affairs (JIIA). Hal ini bertujuan untuk membuka koneksi terhadap Think Tank internasional yang bertujuan untuk mendapatkan rekognisi dari dunia internasional dan sebagai upaya untuk mendapatkan mekanisme pendanaan serta bagaimana cara mengelola Think Tank yang memadai

**Strategi kedua** adalah membuka diri terhadap donor internasional. Hal ini terjadi karena CSIS tidak memiliki keterikatan dengan pemerintah, hal ini dapat ditafsirkan sebagai pergeseran peran CSIS. Apabila sebelumnya CSIS Indonesia memiliki peran sebagai lembaga penelitian yang mengkaji hal-hal yang dibutuhkan pemerintah, pada era transisi CSIS Indonesia berupaya untuk menjadi Think Tank yang lebih berkari, bebas nilai, dan lebih independen. Hal ini turut didukung dengan wawancara yang dilakukan dengan direktur riset CSIS yang menjelaskan bahwa “*Kemudian, dari 1995 hingga 2000, saya terlibat dalam berbagai proyek. Sejauh yang saya tahu, proyek-proyek tersebut sudah bersifat multifunded, didanai dari berbagai sumber. Setelah menyelesaikan studi S3, saya sendiri mulai mengajukan pendanaan, misalnya dari Komisi Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).*” Hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya yang dilakukan CSIS Indonesia secara kelembagaan untuk menjadi Think Tank yang tidak hanya berfokus pada agenda pemerintah, namun dapat membentuk agenda tersendiri dengan pendanaan internasional yang diperkuat dengan reputasi CSIS di dunia internasional pasca beberapa petinggi CSIS melakukan lawatan ke dalam beberapa negara.

Selanjutnya, **Strategi ketiga** adalah mendorong ide demokratisasi dengan infrastruktur politik yang terafiliasi dengan CSIS Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan pecahnya CSIS

Indonesia dengan pemerintahan Soeharto sejatinya berkaitan dengan semangat demokratisasi, ketika Jusuf Wanandi meminta Presiden Soeharto untuk memikirkan penerus selanjutnya dari rezim tersebut, sehingga pasca perpecahan dengan rezim Soeharto, ide ide terkait dengan demokratisasi semakin menguat. Kuatnya semangat demokratisasi di dalam tubuh CSIS Indonesia kala itu digambarkan dengan komperhensif sebagai berikut *“Jadi, saya merasa itu adalah generasi-generasi yang sudah mulai kritis terhadap rezim. Dan kalau tidak salah, salah satu anak dari pegawai kita menjadi korban yang disemati, yang ditembak. Anaknya Pak Arief, yang ibunya Sumarsi, itu adalah korban”*. Semangat demokratisasi tersebut sejatinya turut diperkuat dengan konsolidasi modalitas politik yang dimiliki CSIS Indonesia, yakni Jakarta Post yang didirikan oleh Jusuf Wanandi. Meskipun Jakarta Post sudah berdiri sebelum konflik antara CSIS Indonesia dengan Soeharto, namun dimulai pada tahun 1991 ketika Susanto Pudjomartono menjadi pimpinan redaksi Jakarta Post menjadi lebih kritis dan menjadi saluran utama kritisisme peneliti CSIS terhadap rezim pemerintahan Soeharto kala itu



Relasi antara Jakarta Post dengan CSIS diakui oleh peneliti CSIS yang mengungkapkan bahwa *“Jadi, Jakarta Post itu penting, dan itu menjadi satu-satunya media berbahasa Inggris yang pertama. Dan itu juga menjadi istilahnya, modal bagi kita untuk menyampaikan pemikiran kita.”* Selain memiliki relasi dengan Jakarta Post, CSIS Indonesia turut memiliki beragam modalitas dan relasi pada dimensi lain. dimensi ekonomi, yang diwujudkan melalui keterlibatan tokoh-tokoh CSIS dalam kepemimpinan asosiasi bisnis seperti Apindo yang selama bertahun-tahun diketuai oleh Sofyan Wanandi, serta afiliasi dengan Santini Group. Jaringan bisnis ini tidak hanya menjamin kemandirian finansial relatif CSIS pasca-kehilangan patronase negara di era Reformasi, tetapi juga menjadikan narasi liberalisasi ekonomi yang didorong CSIS memiliki basis aktor konkret yang berkepentingan untuk merealisasikannya. Ketiga, dimensi operasionalisasi kebijakan, yang paling eksplisit terlihat dari pendirian Tenggara Strategics, sebuah perusahaan konsultan yang lahir dari jaringan alumni CSIS dan bergerak di bidang *advisory* politik serta bisnis. Selain itu modalitas politik yang eksis karena relasi atau sayap CSIS Indonesia, beberapa peneliti CSIS Indonesia juga seringkali turut menjadi bagian dari pemerintahan, seperti menjadi menteri, duta besar, hingga

jabatan jabatan lain yang terafiliasi dengan pemerintahan. Sebut saja seperti Hassan Wirajuda yang menjadi Menteri Luar Negeri dalam beberapa periode, Mari Elka Pangestu yang juga menjadi menteri pada era SBY hingga Rizal Sukma yang menjadi Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya, Irlandia dan International Maritime Organization pada era Presiden Jokowi. Dapat dikatakan bahwa peneliti dan pengurus CSIS Indonesia selalu memiliki kursi di dalam pemerintahan di semua rezim kecuali pada pemerintahan Habibie. Beberapa peneliti, hingga pengurus yang menjadi menteri di dalam pemerintahan baik yang ada pada masa pemerintahan salah satu bentuk CSIS Indonesia merawat koneksinya dengan pemerintah dan berupaya untuk mensubstitusikan peran yang dilakukan Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardhani pada era orde baru, meskipun tidak sama.

Hal ini sejatinya merupakan bentuk CSIS Indonesia untuk menghadirkan dirinya kembali untuk aktif di dalam “policy advocacy” dan menjalankan tugasnya sebagai Think Tank sebagai lembaga yang memberikan nasihat kebijakan pada pemerintah (Interview dengan Akademisi Politik dengan Konsentrasi Masyarakat Sipil, 2026). Namun dalam hal ini CSIS memahami bahwa untuk dapat menjadi Think Tank yang memiliki pengaruh, dibutuhkan koneksi yang kuat dan modalitas politik yang kuat untuk pemerintah mendengarkan saran kebijakan yang disuarakan CSIS Indonesia

### **Di Antara Policy Club dan Advocacy Think Tank: Anomali Tipologis CSIS Indonesia di Era Reformasi**

Transformasi yang terjadi pada CSIS Indonesia pada era orde baru dan pada era reformasi menunjukkan perubahan drastis seperti independensi yang lebih bebas, komposisi peneliti yang semakin heterogen, hingga pembahasan yang semakin tajam pada pembahasan demokratisasi. Selanjutnya berkaitan dengan dengan tipologi, CSIS Indonesia yang sebelumnya memiliki tipe Think Tank Government Contractor bergeser menjadi bentuk tipologi yang lain. Namun sebagaimana yang dijelaskan (Abelson, 2018) bahwa sejatinya sulit untuk mengidentifikasi tipologi Think Tank. Bahkan dalam bukunya Abelson menuliskan bahwa “*Like chameleons constantly changing their complexion to suit new environments*” Hal ini juga didukung oleh akademisi yang berfokus pada Think Tank seperti (Medvetz, 2012) yang menjelaskan bahwa menurutnya sulit untuk mengidentifikasi think tank secara spesifik ke dalam tipologi yang tersedia di dalam literatur literatur yang sudah ada

Transformasi yang dilakukan CSIS Indonesia menunjukkan bahwa terdapat pergeseran CSIS Indonesia untuk bergerak menuju “Advocacy Think Tank” yang dapat didefinisikan sebagai sebuah think tank yang didorong oleh dorongan ideologis think tank terhadap suatu kebijakan yang diimplementasikan dengan strategi komunikasi agresif untuk mempengaruhi opini publik dan kebijakan melalui media massa (Abelson, 2018). Selain itu dalam berbagai literatur turut disebutkan pula bahwa advocacy Think Tank merupakan tipologi think tank yang memiliki peran dalam pertarungan ideologis di dalam publik (Weaver & McGann, 2017)

Hal yang membuat CSIS memiliki ciri yang sama dengan Advocacy Think Tank. Pertama berkaitan dengan diseminasi penelitian, CSIS Indonesia cenderung memiliki relasi yang erat dengan media seperti Jakarta Post, namun keunikan lainnya adalah CSIS Indonesia merupakan Think Tank yang seringkali mengundang media untuk melakukan media briefing apabila terjadi suatu isu yang menghangat di telinga publik, sehingga sesuai dengan apa yang disampaikan (Abelson, 2018) bahwa Advocacy Think Tank bergantung pada media pada diseminasi penelitiannya. Selain itu Abelson, 2012 dalam penelitiannya menuliskan bahwa “*Advocacy Think Tank have place a high premium on gaining access to the media*” Namun terdapat pula aspek yang tidak sesuai dengan CSIS Indonesia, yakni sifat ideologis dari yang digambarkan bahwa “ Hal ini disebabkan karena Think Tank advokasi memiliki ideologi politik yang sangat partisan dan

melakukan pertarungan gagasan di dalam ruang publik untuk mengakomodasi ideologinya. Meskipun dalam beberapa catatan disebutkan bahwa secara ekonomi misalnya, CSIS Indonesia berposisi pada ekonomi pro pasar, namun karena secara iklim politik Indonesia tidak memiliki pertarungan ideologi tertentu, maka hal tersebut juga berdampak bagi CSIS Indonesia dengan tidak melakukan pertarungan ideologis dengan siapapun.

Selain itu, CSIS Indonesia juga memiliki kemiripan secara tipologis dengan think tank akademik atau yang seringkali disebut sebagai *university without students think tank*. Hal ini disebabkan karena CSIS Indonesia secara konsisten memproduksi kajian-kajian kebijakan yang berorientasi pada standar akademis yang ketat, dengan melibatkan para peneliti berlatar belakang ilmu politik, ekonomi, dan hubungan internasional sebagaimana yang menjadi karakteristik utama tipologi ini (Abelson, 2012). Produk-produk intelektual CSIS Indonesia, mulai dari *working papers*, jurnal *The Indonesian Quarterly*, hingga laporan kebijakan, mencerminkan orientasi riset mendalam yang tidak semata-mata bersifat reaktif terhadap agenda pemerintah, melainkan juga berupaya membangun pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi Indonesia. Meskipun demikian, kemiripan ini bersifat parsial, sebab Abelson (2012) sendiri mencatat bahwa tipologi *university without students* dalam konteks di luar Amerika Serikat lebih tepat disebut sebagai *policy research institution*, sebuah kategori yang mensyaratkan mayoritas sumber daya lembaga dicurahkan untuk kegiatan riset. Dalam kasus CSIS Indonesia, orientasi riset tersebut tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu beriringan dengan agenda advokasi kebijakan dan pemeliharaan jaringan politik, sehingga kemiripan tipologis ini kembali memperkuat argumen bahwa CSIS Indonesia sulit untuk diklasifikasikan secara tunggal ke dalam satu tipologi yang ada.

Terakhir, Kemiripan tipologis CSIS Indonesia juga dapat ditemukan dalam kategori *policy clubs* sebagaimana yang dikonseptualisasikan oleh (Lindquist, 1989) Karakteristik utama tipologi ini adalah fungsinya sebagai forum pertemuan antara akademisi, analis kebijakan, dan pembuat kebijakan untuk mendiskusikan isu-isu publik. Namun tidak dapat dikategorikan secara penuh pula, sebab CSIS Indonesia memiliki kemampuan untuk menciptakan analisis strategis jangka panjang, sedangkan *policy clubs* digambarkan sebagai think tank dengan kelembagaan yang lemah

Bentuk anomali CSIS Indonesia sejatinya juga terlihat dari segi pemosiannya, dimana secara general sejatinya Think Tank memiliki posisi yang menjadi titik temu beberapa dimensi seperti dimensi pemerintahan, dimensi bisnis, dimensi dunia akademik, dimensi media dan terakhir dimensi masyarakat. Namun CSIS Indonesia memiliki kedekatan yang tidak biasa, sebab beberapa pendiri atau individu yang merupakan bagian dari CSIS Indonesia menjadi aktor dalam beberapa dimensi tersebut. Dalam dimensi bisnis dapat diidentifikasi Sofjan Wanandi yang menjadi Ketua umum APINDO selama bertahun-tahun, Santini group sebagai perusahaan Keluarga Wanandi. Dalam dimensi media dapat terlihat Jakarta Post yang merupakan bagian dari CSIS Indonesia. Selanjutnya pada dimensi pemerintahan terdapat beberapa peneliti, pengurus CSIS Indonesia yang masuk kedalam pemerintahan, sebut saja pada pemerintahan Prabowo terdapat Mari Elka Pangestu yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Anggota Dewan Pembina CSIS Indonesia, terakhir pada sisi akademik, CSIS Indonesia juga memiliki relasi dengan Universitas Prasetya Mulya. Hal ini disebabkan karena beberapa pendiri CSIS Indonesia juga merupakan pendiri yayasan Prasetya Mulya.

Hal tersebut sejatinya turut memperkuat proposisi yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa, secara tipologis CSIS Indonesia pasca reformasi merupakan Think Tank Hibrida atau boleh dikatakan sebagai Think Tank yang anomali secara tipologis. Hal ini disebabkan setidaknya karena 2 hal yakni pertama secara tipologis, CSIS Indonesia merupakan sebuah Think Tank yang berdiri

sendiri yang berdiri diantara Advocacy Policy Think Tanks, University Without Students Think Tank dan Policy Clubs Think Thanks, Kedua dari segi pemosisiannya, ketika (Medvetz, 2012) menuliskan bahwa Think Tank secara natural dan general memiliki pemosisian yang berada atau dekat dengan

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi CSIS Indonesia dari *Government Contractor Think Tank* menuju *Think Tank* hibrida merupakan proses adaptasi kelembagaan yang berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh dinamika politik yang berubah drastis antara era Orde Baru dan era Reformasi. Pada periode 1971–1987, CSIS Indonesia menjalankan fungsinya sebagai *Government Contractor Think Tank* yang eksistensinya bergantung pada kedekatan struktural dengan aktor-aktor kunci di lingkungan Presiden Soeharto, khususnya Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardhani. Patronase negara yang diterima CSIS, termasuk pemberian kantor di Jalan Kesehatan sebagai bentuk *in-kind state patronage*, menjadi penanda utama tipologi ini.

Pasca retaknya relasi dengan pemerintahan Soeharto pada 1987, CSIS Indonesia merespons dengan tiga strategi adaptasi: membangun koneksi dengan komunitas epistemik internasional, membuka diri terhadap pendanaan donor asing, serta mengonsolidasikan infrastruktur politik dan media yang terafiliasi dengan jaringan institusionalnya. Ketiga strategi ini secara kolektif merepresentasikan rekonstruksi modal simbolik CSIS dari ketergantungan pada modal politik negara menuju diversifikasi modal yang mencakup dimensi ekonomi, media, dan jaringan internasional sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Medvetz (2012).

Pada era Reformasi, identifikasi tipologis CSIS Indonesia tidak dapat diselesaikan secara tunggal dan definitif. CSIS Indonesia berada di antara tiga tipologi sekaligus: *advocacy think tank* dalam hal orientasi diseminasi media dan dorongan demokratisasi; *university without students* dalam hal konsistensi produksi riset akademis berbasis standar ilmiah; serta *policy clubs* dalam hal fungsinya sebagai forum pertemuan antara akademisi, analis, dan pembuat kebijakan. Kondisi ini menjadikan CSIS Indonesia sebagai *Think Tank* hibrida yang anomali secara tipologis, dan kesulitan mengklasifikasikannya bukan merupakan kelemahan analitis, melainkan cerminan kompleksitas kelembagaan yang diakui Abelson (2018) sebagai tantangan inheren dalam studi *Think Tank*. Lebih jauh, anomali tipologis CSIS juga tercermin dalam pemosisiannya yang melampaui batas-batas field yang diidentifikasi Medvetz (2012), di mana individu-individu yang berafiliasi dengan CSIS tidak hanya berada *di antara* field media, bisnis, pemerintahan, dan akademik, melainkan secara aktif menjadi aktor *di dalam* setiap field tersebut secara simultan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abelson, D. (2018). *Do Think Tanks Matter? Third Edition: Assessing the Impact of Public Policy Institutes*. McGill-Queen's Press.
- Allern, S., & Pollack, E. (2020). The Role of Think Tanks in the Swedish Political Landscape. *Scandinavian Political Studies*, 43(3), 145–169. <https://doi.org/10.1111/1467-9477.12180>
- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). Co-creation: the new kid on the block in public governance. *Policy & Politics*, 49(2), 211–230. <https://doi.org/10.1332/030557321X16115951196045>
- Birkland, T. A. (2019). *An Introduction to the Policy Process*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351023948>
- Botchway, T. P. (2018). Civil society and the consolidation of democracy in Ghana's fourth republic. *Cogent Social Sciences*, 4(1), 1452840. <https://doi.org/10.1080/23311886.2018.1452840>
- Burnham, P., Grillard, K., Grant, W., & Layton-Henry, Z. (2004). *Research Methods in Politics*. Palgrave Macmillan.
- Chen, P., & Xu, Y. (2024). The Role of Think Tanks in the Foreign Affairs Work of the Taiwan Authorities. *Chinese Journal of International Review*, 06(01). <https://doi.org/10.1142/S2630531324500033>
- Christensen, J., & Holst, C. (2020). How Do Advocacy Think Tanks Relate to Academic Knowledge? The Case of Norway. *Scandinavian Political Studies*, 43(3), 223–239. <https://doi.org/10.1111/1467-9477.12184>
- Cohen, J., & Arato, A. (n.d.). *Civil Society and Political Theory*. MIT Press.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. JHU Press.
- Drezner, D. W. (2015). American think tanks in the twenty-first century. *International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis*, 70(4), 637–644. <https://doi.org/10.1177/0020702015593702>
- Fatonie, I. (2022). The role of Indonesian Think Tanks as policy entrepreneurs in policy development of village governance. *Journal of Asian Public Policy*, 15(3), 500–516. <https://doi.org/10.1080/17516234.2020.1829354>
- Jenkins Smith, & Sabatier, P. (1993). The study of public policy processes. In *The Nation's Health*. Jones & Bartlett Learning.
- Jeziarska, K. (2020). Three Types of Denial: Think Tanks as a Reluctant Civil Society Elite. *Politics and Governance*, 8(3), 152–161. <https://doi.org/10.17645/pag.v8i3.3015>
- John, C. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Kelstrup, J. D. (2017). Quantitative differences in think tank dissemination activities in Germany, Denmark and the UK. *Policy Sciences*, 50(1), 125–137. <https://doi.org/10.1007/s11077-016-9254-0>
- Köllner, P., Zhu, X., & Abb, P. (2018). Understanding the Development of Think Tanks in Mainland China, Taiwan, and Japan. *Pacific Affairs*, 91(1), 5–26. <https://doi.org/10.5509/20189115>
- Lewis, D., Kanji, N., & Themudo, N. S. (2020). *Non-Governmental Organizations and Development*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429434518>
- Mann, T. (2015). *The Oxford Guide to Library Research* (4th ed.). Oxford University Press.
- Marsh, D., & Smith, M. (2000). Understanding Policy Networks: Towards a Dialectical Approach. *Political Studies*, 48(1), 4–21. <https://doi.org/10.1111/1467-9248.00247>

- McGann, J., & Whelan, L. (2020). *Global Think Tanks Policy Networks and Governance*. Routledge.
- Medvetz, T. (2012). *Think Tanks in America*. University of Chicago Press.
- Migdal, J. (1998). *Societies and weak state: Statesociety Relations and State Capabilities in the world*. Princeton University Press.
- Ohemeng, F. L. K. (2015). Civil Society and Policy Making in Developing Countries: Assessing the Impact of Think Tanks on Policy Outcomes in Ghana. *Journal of Asian and African Studies*, 50(6), 667–682. <https://doi.org/10.1177/0021909614535917>
- Pautz, H. (2011). Revisiting the think-tank phenomenon. *Public Policy and Administration*, 26(4), 419–435. <https://doi.org/10.1177/0952076710378328>
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2000). Citizens Versus the New Public Manager. *Administration & Society*, 32(1), 9–28. <https://doi.org/10.1177/00953990022019335>
- Rich, A. (2004). *Think Tanks, Public Policy, and the Politics of Expertise*.
- Salas-Porras, A. (2021). Democracy, civil society and the strategies pursued by think tanks in Mexico. In *Critical Perspectives on Think Tanks*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781789909234.00012>
- STONE, D. (2007). RECYCLING BINS, GARBAGE CANS OR THINK TANKS? THREE MYTHS REGARDING POLICY ANALYSIS INSTITUTES. *Public Administration*, 85(2), 259–278. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2007.00649.x>
- Stone, D. (2017). Dynamics of think tank development in Southeast Asia, Australia, New Zealand, and Papua New Guinea. In J. G. McGann & R. K. Weaver (Eds.), *Think tanks and civil societies: Catalysts for ideas and action* (pp. 383–410). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315135595-17>
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*. Alfabeta.
- Weaver, R. K., & McGann, J. G. (2017). Think tanks and civil societies in a time of change. In J. G. McGann & R. K. Weaver (Eds.), *Think tanks and civil societies: Catalysts for ideas and action*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315135595-1>
- Weiss, J. A. (1979). Access to Influence. *American Behavioral Scientist*, 22(3), 437–458. <https://doi.org/10.1177/000276427902200307>
- Zhang, D. (2021). The media and think tanks in China: The construction and propagation of a think tank. *Media Asia*, 48(2), 123–138. <https://doi.org/10.1080/01296612.2021.1899785>